

Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2019

Redemptus Ntangis
Holymayor¹, Yulia
Setyarini²

Received, Maret, 2022
Revised, Maret, 2022
Accepted, Maret, 2022

Abstrak

Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari berbagai provinsi, kota dan kabupaten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan pemberian kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban untuk melaksanakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem ketatanegaraan. Setiap kepala pemerintahan dapat mengelola pendapatan daerah secara efektif dan efisien dalam pelayanan dan kontribusinya kepada masyarakat. Tujuannya untuk menganalisis kontribusi dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2019.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017-2019 tingkat kontribusi yang sangat baik terdapat pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai yaitu Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah, tahun 2017 sebesar 76,02%, tahun 2018 sebesar 64,99%, dan pada tahun 2019 sebesar 69,59%. Tingkat efektivitas yang sangat efektif adalah Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah, dimana pada tahun 2017 sebesar 102,23%, tahun 2018 sebesar 113,11%, dan tahun 2019 sebesar 137,57%.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah Dipisahkan, Asli Daerah Lainnya Yang Sah Pendapatan, Kontribusi, dan Efektivitas.

Abstract

The Republic of Indonesia is the largest archipelagic country in the world, which consists of various provinces, cities and regencie. Based on Law Number 12 of 2008 concerning the Second Amendment to Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Law Number 33 of 2004 concerning Financial Balance between the Central Government and Regional Government, the administration of regional government is carried out by granting the broadest authority. -the breadth, accompanied by the granting of rights and obligations to implement regional autonomy in the unit of the state administration system. Each head of government can manage regional income effectively and efficiently in service and contribution to the community. The aim is to analyze the contribution and effectiveness of the Regional Original Revenue (PAD) of Manggarai Regency in 2017-2019.

The results of this study show that in 2017-2019 a very good level of contribution is found in the Manggarai Regency's Original Regional Revenue, namely Other Legitimate Regional Original Income, in 2017 it is 76.02%, in 2018 it is 64.99%, and in 2019 of 69.59%. The very effective level of effectiveness is Other Legitimate Local Revenue, where in 2017 it was 102.23%, in 2018 it was 113.11%, and in 2019 it was 137.57%.

Keywords: Local Tax, Regional Levy, Separated Regional Wealth Proceeds, Other Legitimate Local Native Income, Contribution, and Effectiveness.

Cite this article as: Redemptus Ntangis Holymayor, Yulia Setyarini, 2022. Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2019. Bulletin of Management and Business, Volume 3, Nomor 1, Pages 267-277. Malang: Universitas Widyagama

DOI: <https://doi.org/10.31328/bmb.v1i2>

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai provinsi, kota dan kabupaten yang tersebar diberbagai pulau, salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam satuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kebijakan pemerintah daerah merupakan bagian yang penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten termasuk didalamnya kebijakan dalam mengatur pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah serta pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kabupaten Manggarai merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan target dan realisasi setiap sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2017-2019. Dalam surat kabar online, florespost.com (27/01/2020), dijelaskan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2019 melampaui target. Fenomena tersebut bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Target dan Realisasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2017-2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Keterangan	2017		2018		2019	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Daerah	25.898.895	19.713.195	28.276.893	20.638.838	28.416.288	19.159.709
2	Retribusi Daerah	8.529.911	5.691.771	9.883.421	5.528.670	8.900.365	6.316.974
3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.979.275	5.492.341	5.635.234	5.305.940	5.601.773	6.0228.773
4	Lain-lain PAD yang sah	95.795.955	97.932.210	51.659.359	58.431.186	52.400.722	72.055.470
	Total	141.204.037	128.829.520	95.454.907	89.904.635	95.319.150	103.585.928

Dengan demikian fenomena pada Kabupaten Manggarai faktanya bahwa antara target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai mulai dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami perubahan setiap tahunnya. Di mana tahun 2017 realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 91,24%, tahun 2018 sebesar 94,19%, dan pada tahun 2019 sebesar 108,65%. Meskipun secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah melampaui target, tetapi secara parsial sinergi antara komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai menunjukkan ada komponen yang mencapai target dan ada yang tidak mencapai target. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti “Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2019”.

KAJIAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan perundang-undangan. yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. PAD bersumber dari Pajak Daerah; Retribusi Daerah; dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah pada Undang-undang no.33 tahun 2004 ayat (1) huruf d meliputi hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembangunan dan pembiayaan urusan rumah tangga daerah, sehingga PAD diharapkan dapat menjadi sumber utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah terlihat dari semakin besarnya fungsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembiayaan daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting salah satunya adalah Pajak daerah dan retribusi daerah yang digunakan untuk untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pun memberikan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Adapun pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) (kemenkeu.go.id).

Kontribusi

Pajak Daerah; Retribusi Daerah; dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah merupakan salah satu kontribusi terhadap sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi bertujuan untuk mengetahui sejauh

mana sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan penelitian Herjanti (2020) rata-rata kontribusi sumber-sumber PAD dari pajak hotel, restoran dan hiburan di Kota Bogor periode 2013-2017 memiliki kriteria sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah pusat mengenai Halim (2010:163) menjelaskan bahwa kontribusi dapat diperoleh melalui penerimaan / realisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah}}{\Sigma \text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Kontribusi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Persentase (%)	Keterangan
00,00% - 10,00%	Sangat Kurang
11,00% - 20,00%	Kurang baik
21,00% - 30,00%	Sedang
31,00% - 40,00%	Cukup Baik
41,00% - 50,00%	Baik
>50,00%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 (dalam Murniati dan Kasasih, 2017)

Efektivitas

Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas dapat dikatakan efektif jika suatu proses atau kegiatan dapat mencapai tujuan atau sasaran akhir. Efektivitas pajak daerah dapat dihitung dari potensi kerja dari suatu unit kerja (Halim, 2004). Pada penelitian Moridu (2017) menjelaskan bahwa Kabupaten Banggai memiliki tingkat efektivitas tahun Tahun 2012 – 2016 rata-rata 107, 33 % artinya Kabupaten tersebut memiliki tingkat efektivitas pajak dan retribusi daerah sangat baik terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis efektivitas merupakan perbandingan realisasi penerimaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terhadap target penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Besarnya efektivitas dapat dirumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Efektivitas Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Persentase (%)	Keterangan
----------------	------------

< 60%	Tidak Efektif
60,00% - 80,00%	Kurang Efektif
80,00% - 90,00%	Cukup Efektif
90,00% - 100,00%	Efektif
>100,00%	Sangat Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 (dalam Murniati dan Kasasih, 2017)

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:13) menjelaskan bahwa karakteristik penelitian kualitatif bersifat deskriptif, di mana penelitian kualitatif menekankan pada proses dan makna dan tidak hanya pada pengumpulan data, tetapi juga menganalisis dan menjelaskan arti dari data yang diperoleh peneliti menjadi suatu wacana dan memberikan kesimpulan dengan logis, praktis, dan teoritis.

Menurut Moleong (2006:6) penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian yang bersifat kualitatif menekankan pada proses dan makna suatu data. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tingkat kontribusi dan efektivitas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai pada tahun 2017-2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kontribusi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah memiliki Kontribusi / sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2017-2019. Untuk mengetahui tingkat dan kriteria kontribusi setiap komponen, peneliti menggunakan rumus Realisasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dibagi Realisasi Pendapatan Asli Daerah dikali 100 % atau bisa dilihat pada tabel berikut;

Tabel 4. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2017-2019

No	Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Keterangan (%)	Kriteria
1.	2017	19.713.195.578,00	128.829.520.073,07	15,30	Kurang baik
2.	2018	20.638.838.490,00	89.904.635.200,78	22,96	Sedang
3.	2019	19.159.709.110,00	103.585.928.126,51	18,50	Kurang baik

Tabel 5. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2017-2019

No .	Tahun	Realisasi Retribusi Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Keterangan (%)	Kriteria
1.	2017	5.691.771.878,00	128.829.520.073,07	4,42	Sangat Kurang
2.	2018	5.528.670.280,00	89.904.635.200,78	6,15	Sangat Kurang
3.	2019	6.316.974.749,00	103.585.928.126,51	6,10	Sangat Kurang

Tabel 6. Kontribusi Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2017-2019

No .	Tahun	Realisasi Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Keterangan (%)	Kriteria
1.	2017	5.492.341.878,00	128.829.520.073,07	4,26	Sangat Kurang
2.	2018	5.305.940.424,00	89.904.635.200,78	5,90	Sangat Kurang
3.	2019	6.028.773.598,90	103.585.928.126,51	5,82	Sangat Kurang

Tabel 7. Kontribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2017-2019

No .	Tahun	Realisasi Lain-lain PAD yang Sah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Keterangan (%)	Kriteria
1.	2017	97.932.210.739,07	128.829.520.073,07	76,02	Sangat Baik
2.	2018	58.431.186.006,78	89.904.635.200,78	64,99	Sangat Baik
3.	2019	72.080.470.668,61	103.585.928.126,51	69,59	Sangat Baik

Berdasarkan tabel kriteria kontribusi (tabel 2), Lain-lain Pendapatan Asli Daerah memiliki kontribusi yang sangat baik terhadap pendapatan daerah ditahun 2017-2019, sedangkan Retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah memiliki kontribusi yang sangat kurang baik terhadap pendapatan daerah ditahun 2017-2019, dan realisasi pajak daerah ditahun 2017 dan 2019 memiliki kontribusi yang kurang baik terhadap Pendapatan Asli

Daerah. Hal ini dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Manggarai ditahun 2017-2019 sebagian besar berasal dari Lain-lain PAD yang Sah.

Tingkat kontribusi setiap sumber Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Pembimbing Tingkat I Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai, Bpk. Robertus C. Bosko, SE., M.Ec.Dev., menjelaskan bahwa hal utama yang menyebabkan tingkat kontribusi setiap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ada yang baik, kurang baik, atau pun sangat kurang adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri. Misalnya, dari total target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai 100%, Pajak Daerah target yang ditetapkan hanya memberikan kontribusi sebesar 20%, Retribusi Daerah sebesar 15%, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10%, dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 65%.

Analisis Efektivitas Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Analisis Efektivitas yaitu perbandingan realisasi penerimaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terhadap target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2017-2019. Untuk mengetahui tingkat dan kriteria efektivitas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai.

Tabel 8. Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2017-2019

No	Tahun	Target	Realisasi	Keterangan (%)	Kriteria
1.	2017	25.898.895.360,00	19.713.195.578,00	76,12	Kurang Efektif
2.	2018	28.276.893.027,00	20.638.838.490,00	72,99	Kurang Efektif
3.	2019	28.416.288.536,00	19.159.709.110,00	67,43	Kurang Efektif

Pada tabel diatas tahun 2017 realisasi pajak daerah yang dicapai sebesar 76,12 %, tahun 2018 realisasi Pajak Daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 72,99 %, dan tahun 2019 realisasi Pajak Daerah kembali mengalami penurunan sebesar 67,43 %. Secara keseluruhan realisasi Pajak Daerah mengalami penurunan setiap tahunnya, berdasarkan tabel 2.4 tentang kriteria efektivitas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, realisasi Pajak Daerah dari tahun 2017 sampai dengan 2019 kurang efektif. Berdasarkan Jawaban Bupati Manggarai terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Manggarai atas Nota Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai, adapun beberapa faktor yang menyebabkan Realisasi Pajak Daerah kurang efektif adalah sebagai berikut;

1. Adanya penundaan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.
2. Pajak Penerangan Jalan tergantung pada penerimaan PLN yang secara keseluruhan ditangani oleh PLN Provinsi berdasarkan surat transfer setiap bulan.
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), khususnya PBB Perkotaan.
4. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya membayar pajak.
5. Ada pengusaha yang merupakan wajib pajak yang menutup tempat usahanya, seperti biliar, tempat karaoke, dan klub malam.

Tabel 10. Efektivitas Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2017-2019

No	Tahun	Target	Realisasi	Keterangan (%)	Kriteria
1.	2017	10.979.275.000,00	5.492.341.878,00	50,02	Tidak Efektif
2.	2018	5.635.234.008,00	5.305.940.424,00	94,16	Cukup Efektif
3.	2019	5.601.773.598,00	6.028.773.598,90	107,62	Sangat Efektif

Pada tabel diatas, tahun 2017 efektivitas sebesar hasil kekayaan daerah sebesar 50,02%, di mana dengan perolehan tersebut Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak efektif. Tahun 2018 meningkat cukup signifikan, tetapi belum mencapai target yang ditetapkan. Di mana target yang ditetapkan adalah Rp5.635.234.008,00 dan realisasi yang diperoleh adalah 5.305.940.424,00 dengan rasio efektivitas sebesar 94,16%. Berdasarkan kriteria efektivitas, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2018 cukup efektif. Tahun 2019 realisasi Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan kembali mengalami kenaikan. Realisasi Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2019 melebihi target yang telah ditetapkan, di mana target yang ditetapkan sebesar Rp5.601.773.598,00 dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp6.028.773.598,90 dengan rasio efektivitas sebesar 107,62%. Berdasarkan kriteria efektivitas, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2019 sangat efektif.

Berdasarkan Jawaban Bupati Manggarai terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Manggarai atas Nota Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai, adapun beberapa faktor yang menyebabkan kontribusi Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai sangat kurang dan Realisasi dari Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terus meningkat dari tahun 2017 sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut;

1. Terhadap berkurangnya Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah pada BUMD sebesar Rp5.000.000.000, pada Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017

dijelaskan bahwa pengurangan tersebut sebagai dampak dari realisasi SILPA sebesar Rp9.539.705.427, yang tidak sesuai dengan asumsi pada APBD Induk Tahun 2017 sebesar Rp.25.000.000.000. Selain itu juga untuk menekan/mengurangi defisit Tahun Anggaran 2017.

2. Cara perhitungan keuntungan penyertaan modal untuk BUMD dan untuk penyetoran kas daerah berdasarkan perjanjian yang tertuang dalam anggaran dasar BUMD. Artinya, penerimaan atas investasi Pemerintah Daerah tergantung hasil dari setiap BUMD yang telah diatur masing-masing BUMD.

3. Berdasarkan hasil pembahasan bersama terhadap target penerimaan Deviden Bank NTT yang ditetapkan dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 9.224.687.828, namun pada kenyataannya berdasarkan hasil RUPS Bank NTT untuk tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Manggarai memperoleh Deviden sebesar Rp. 5.446.674.252 sehingga berkurang sebesar Rp. 3.778.013.576.

4. Berdasarkan hasil pembahasan bersama terhadap target penerimaan Deviden PT. MMI yang ditetapkan dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 150.000.000, namun pada kenyataannya berdasarkan RUPS PT. MMI tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Manggarai memperoleh deviden sebesar Rp. 188.559.756; bertambah Rp.38.559.756.

5. Program pembangunan pada PDAM Tirta Komodo tahun 2019, di mana peningkatan ini berupa, jumlah Ibu Kota Kecamatan yang dilayani dari empat Ibu Kota Kecamatan menjadi tujuh Ibu Kota Kecamatan, rencana sambungan baru 25.657 Sambungan Rumah, serta jumlah Calon Penerima Hibah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) tahun 2019 sebanyak 3.564 Sambungan Rumah. Hal ini menyebabkan semakin banyak masyarakat daerah yang menggunakan Air PDAM sehingga meningkatkan pendapatan dari PDAM Tirta Komodo.

Tabel 11. Efektivitas Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2017-2019

No	Tahun	Target	Realisasi	Keterangan (%)	Kriteria
1.	2017	95.795.955.667,00	97.932.210.739,07	102,23	Sangat Efektif
2.	2018	51.659.359.036,00	58.431.186.006,78	113,11	Sangat Efektif
3.	2019	52.400.722.270,00	72.080.470.668,61	137,57	Sangat Efektif

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, realisasi dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mencapai target. Di mana target yang ditetapkan sebesar Rp95.795.955.667,00 dan realisasi yang terjadi sebesar Rp97.932.210.739,07 atau sebesar 102,23 %. Pada tahun 2018, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meningkat sebesar

113,11 %, di mana target yang ditetapkan sebesar Rp51.659.359.036,00 dikali 100 % dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp58.431.186.006,78. Tahun 2019 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah kembali mengalami peningkatan sebesar 137,57 %, dimana target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 52.400.722.270,00 dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 72.080.470.668,61. Berdasarkan tabel 2.4 tentang kriteria efektivitas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sangat efektif.

Berdasarkan Jawaban Bupati Manggarai terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Manggarai atas Nota Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai, adapun beberapa faktor yang menyebabkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terus meningkat setiap tahunnya adalah sebagai berikut;

1. Penempatan deposito yang mempertimbangkan ketersediaan dana pada kas umum daerah, sehingga mempengaruhi adanya penurunan penerimaan bunga Deposito yang ditargetkan dalam APBD Induk Kabupaten Manggarai.
2. Adanya pembangunan gedung untuk BLUD-RSUD Ben Mboi, di mana fungsi gedung tersebut antara lain; lantai satu diperuntukan sebagai kamar bersalin sedangkan lantai dua diperuntukan sebagai ruangan perawatan setelah bersalin dan lantai tiga untuk ruangan perawatan bagi pasien ginekologi dan untuk ruang bedah sentral, kata dia, terdiri dari 2 lantai yakni ruang intensive unit care (ICU) ada di lantai pertama dan untuk kamar operasi ada lantai dua. Selain itu, pada BLUD-PDAM Tirta Komodo juga meningkatkan kualitas pelayanannya. Peningkatan ini berupa, jumlah Ibu Kota Kecamatan yang dilayani dari empat Ibu Kota Kecamatan menjadi tujuh Ibu Kota Kecamatan, rencana sambungan baru 25.657 Sambungan Rumah, serta jumlah Calon Penerima Hibah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) tahun 2019 sebanyak 3.564 Sambungan Rumah.
3. Adanya selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan (SILPA) yang ditempatkan ke Bank Sentral/Umum untuk menghasilkan bunga/jasa giro.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari penelitian ini adalah untuk tahun 2017 sampai dengan 2019 tingkat kontribusi yang sangat baik terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, masing-masing sebesar 76,02 %, 64,99 %, dan 69,59 %. Sementara kontribusi yang sangat kurang adalah Retribusi Daerah, masing-masing sebesar 4,42 %, 6,15 %, dan 6,10 % dan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan, masing-masing sebesar 4,26 %, 5,90 %, dan 5,82 %. Tingkat efektivitas yang sangat efektif adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, di mana masing-masing tahun sebesar 102,23 %, 113,11 %, 137,57 %. Sementara komponen yang kurang efektif adalah Pajak Daerah, masing-masing tahun sebesar 76,12 %, 72,99 %, dan 67,43 % dan Retribusi Daerah, masing-masing tahun sebesar 66,73 %, 55,94 %, dan 70,97 %.

REFERENSI

- Atika, N., & Sofya, R. (2020). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018. *Jurnal Ecogen*, 3(1), 24-35.
- Depdagri. 1997. Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.

- Herjanti, Secillia, and I. Wayan Teg Teg. "Analisis Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bogor Periode 2013-2017." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 8.1 (2020): 37-48.
- Ilyas, W., Burton, R. 2011. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kamal, M. (2019). Hubungan Pemerintahan Daerah dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014. *SIGn Journal of Law (SIGn Jurnal Hukum)*, 1(1), 18-28.
- Lamia, Alfian. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15.5 (2015).
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan edisi terbaru 2018*. Yogyakarta: ANDI
- Moleong. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moridu, Irwan dan Haruni Ode. Analisis Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi Retribusi Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai *Jurnal Emor* Vol. 2, No 2, Hal 167 – 183
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Prana, R. R. (2019). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen*, 4(1).
- Purba, Elvis, F. dan Parulian Simanjuntak. *Metode Penelitian*. Edisi Kedua: Universitas HKBP Nommensen, Medan. 2011.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 2019. Hasil Koordinasi Evaluasi Raperda Kabupaten Manggarai tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Sutopo. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Siahaan. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi revisi 2010. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Dirjen PUOD. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dirjen PUOD. Jakarta.